

## **DISKURSUS PEMBANGUNAN POROS MARITIM DUNIA: TELAAH KRITIS KEBIJAKAN**

### *Development Discourse of The World maritime Axis: Study on Critical Policy*

Ema<sup>1</sup>, Amiruddin Saleh<sup>2</sup>, Heri Budiarto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Pertanian Bogor

<sup>2</sup> Institut Pertanian Bogor

<sup>3</sup> Universitas Mercu Buana

e-mail : [ramma.production@gmail.com](mailto:ramma.production@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*This study aimed to reveal the development discourses about the vision of Jokowi-JK World Maritime Axis. Discourse is a public communication in which power generates knowledge through discourses, systems thinking and ideas that then establish the concept that binds a country to the planned changes. Through the discussion of Regulation No. 16 of the year 2017 on maritime policy in Indonesia, it is linked to the context of the social, cultural, economic and political aspects that influenced it. By analysing critical discourses about disclosure and disinformation over injustice and supremacy in the discussion. Research carried out by government agencies regulation-makers, observers and the public. Research using a basic data source, a Regulation 16/2017 document, an interview with an author, observers and the public. Results of the analysis show that the micro level, Corpus text regulation, represents the vision of the power of the ' Neoliberal ' ideology and of open foreign political systems. Communicate relationships using the data, symbols, promise and purpose of the power. In the communication entity, a symbol of power used to give emphasis, doctrine, appeal, orders, and supporting policies. As for the level of meso, discursive events in the production process, there is institutional interest as the existence of the new ministership. To help realize the axis of vision of the World Maritime Jokowi-JK with distribution to foreign countries and international fora, hence the introduction of government capital investment projects. At the macro level, in the maritime limits that conflict with the Circumpolar Sea Indonesia poses a threat to the security and safety of our becomes territorial integrity. Institutionally the role of the maritime Coordinator's dominance to prevent the other wing of the Maritime Administration. While socially poor marine infrastructure leads to disparity between the West and East of Indonesia.*

**Keywords:** *ideology, public policy communication, power and symbol relations, power text*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini ingin mengungkap diskursus pembangunan tentang visi Poros Maritim Dunia Jokowi-JK. Diskursus adalah sebuah komunikasi publik di mana kekuasaan memproduksi pengetahuan melalui wacana, sistem berpikir dan ide-ide yang kemudian membangun konsep yang mengikat di sebuah negara untuk menggapai perubahan. Melalui wacana Perpres No.16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, lalu dihubungkan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi nya. Melalui analisis wacana kritis ingin mengungkap dan mengurai atas ketidakadilan serta dominasi dalam wacana. Penelitian dilakukan di instansi Pemerintah pembuat Perpres, pengamat dan masyarakat. Penelitian menggunakan sumber data primer, dokumen Perpres 16/ 2017, wawancara dengan pembuat, pengamat dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada level mikro, Korpus teks Perpres merepresentasikan visi kekuasaan tentang ideologi 'Neoliberal' dan sistem politik luar negeri terbuka. Relasi komunikasi menggunakan data, simbol, janji dan tujuan kekuasaan. Secara entitas,

komunikasi simbol kekuasaan dipakai untuk memberikan penekanan, doktrin, seruan, perintah, dan pendukung kebijakan. Pada level meso, peristiwa diskursif pada proses produksi, terdapat kepentingan institusional sebagai eksistensi Kementerian baru. Untuk membantu mewujudkan visi Poros Maritim Dunia Jokowi-JK dengan mendistribusikan kepada negara sahabat dan forum internasional, sehingga mendatangkan modal investasi proyek pemerintah. Di level makro, secara situasional konflik batas maritim laut Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan dan keselamatan keutuhan wilayah NKRI. Secara institusional dominasi peran Kementerian Koordinator Maritim menindas Kementerian lain yang membidangi kelautan. Secara sosial buruknya infrastruktur maritim menyebabkan disparitas antar wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Kata kunci: ideologi, komunikasi kebijakan publik, kuasa dan relasi simbol teks kekuasaan

## **PENDAHULUAN**

Diskursus Poros Maritim Dunia hadir sebagai manifestasi dari kebijakan pembangunan Jokowi-JK. Cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia merupakan perubahan aktivitas pembangunan negara dari darat ke laut. Jokowi-JK melihat bahwa posisi strategis laut Indonesia menjadi jalur utama pelayaran dunia. Laut Indonesia yang menjadi jalur pelayaran dunia yaitu, laut segitiga Semenanjung Arab, Indocina, dan Samudera Hindia. Untuk itu, secara geografis, sosial, dan ekonomi Indonesia menempatkan pada posisi penting di tingkat global. Terutama, dalam memengaruhi kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan dunia.

Adagium Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Jokowi-JK yang terpilih pada Pilpres 2014 lalu, mengusung visi untuk “Mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia yang kuat dan mandiri,” menuntaskan jati diri bangsa dari konsep kontinental-agraris ke konsep kemaritiman. Visi ini digadang-gadang akan mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia di tahun 2014-2019. Melalui tujuh pilar KKI dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 16 tahun 2017, yaitu; (1) pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; (2) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (3) tata kelola dan kelembagaan di laut; (4) ekonomi infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan; (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (6) budaya bahari; (7) diplomasi maritim. Cita-cita ini menjadi jargon Jokowi-JK dalam mewujudkan mimpi sebuah Negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, dan memberikan kontribusi positif bagi keamanan, perdamaian kawasan serta dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan publik tidak terlepas dari komunikasi publik, di mana gagasan-gagasan hadir sebagai proporsi, pedoman dan arah menuju perubahan. Wacana tidak muncul tanpa makna dan tujuan, melainkan merepresentasikan kepentingan dan kekuasaan pembuatnya. Oleh karena itu, narasi-narasi besar yang sebelumnya menjadi wacana kebijakan publik, kini dipertanyakan secara kritis dalam kajian wacana kritis. Oleh karenanya, tidak sedikit yang menganggap bahwa era sekarang ini sebagai abad ilmiah yang ditandai oleh nihilisme, anarkisme dan pluralisme permainan bahasa (Gabriel 1999:206-219). Narasi Perpres 16/2017 hadir bukan sekadar konstruksi peristiwa, namun merepresentasikan dan mengkomunikasikan perubahan yang ada. Pola narasi yang sama belum tentu menonjolkan makna yang sama. Itulah sebabnya, narasi selalu terikat ruang dan waktu serta budaya di mana narasi itu dihasilkan (Saleh 2015:3).

Bahasa memiliki arti yang penting dalam dunia politik. Bahasa menjadi media yang ampuh untuk menanamkan ideologi, merebut atau mendapatkan, dan mempertahankan kekuasaan (Asmara 2016:379). Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perpres 16/2017 KKI sinergi visi Poros Maritim Dunia diantaranya; (1) Level Mikro, representasi, relasi dan identitas komunikasi pada wacana Perpres 16/2017 KKI sinergi visi Poros Maritim Dunia; (2) Level Meso, proses produksi dan konsumsi Perpres 16/2017 KKI sinergi visi Poros Maritim Dunia; (3) Level Makro, situasional, institusional dan sosial ketika Perpres 16/2017 KKI sinergi visi Poros Maritim Dunia diproduksi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua indikator yang tidak dapat dipisahkan `antar satu dengan lainnya. Indikator pesan, isi pesan dan saluran menjadi penting ketika ingin terjadinya proses komunikasi yang efektif. Terlebih, komunikasi pembangunan yang mencangkup upaya untuk menyampaikan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi publik. Sebagaimana pernyataan Garbner (1967) menyebutkan bahwa komunikasi merupakan interaksi sosial melalui pesan-pesan. Lebih ditegaskan bahwa, komunikasi merupakan sebuah proses transfer pikiran, atau perasaan oleh seseorang (komunikator) melalui saluran (media) kepada orang lain (komunikan). Komunikasi pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lainnya yang muncul dari kegiatan berpikir (Bungin 2006:30-31).

Diskursus atau dalam bahasa Indonesia adalah wacana diambil dari terjemahan bahasa Inggris '*discourse*'. Kata '*discourse*' sebetulnya berasal dari kata Latin '*discursus*' yang berarti lari kian kemari (diturunkan dari yang berbeda dan *curre* terjemahan bahasa Inggris '*discourse*'). Kata *discourse* sebetulnya berasal dari ide-ide atau gagasan-gagasan; konversi atau percakapan. Kedua, komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subyek studi atau pokok telaah. Ketiga, risalat tulis, disertasi formal, kuliah, ceramah, dan khutbah (Sobur 2012:9-10). Istilah Diskursus dipopulerkan oleh Foucault (2012:106) lebih menekankan pada konsep kekuasaan dan pengetahuan, dimana kekuasaan itu memproduksi pengetahuan melalui wacana yang mengandung ide, gagasan, ataupun konsep. Sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep yang mengikat dari semua lapisan di sebuah negara untuk menggapai perubahan yang direncanakan.

Teks merupakan salah satu bentuk praktek ideologi, bahasa, tulisan, pilihan kata maupun struktur gramatika yang dipilih dengan ungkapan membawa makna ideologi tertentu dalam taraf memenangkan dukungan publik (Eriyanto 2005:13). Berkenaan dengan titik perhatian kajian yang terletak pada analisis wacana, terdapat tiga hal penting yang saling berkaitan: teks, konteks dan wacana. Analisis wacana yang dimaksud di sini adalah mendeskripsikan teks dan konteks secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi (Halwati 2013:149).

Tujuan teori kritis hadir sebagai penekanan dan implikasi praktis terhadap masyarakat. Dengan kata lain, ada penekanan hubungan antar teori dan praksis atau harus diterjemahkan dalam sebuah tindakan. Menurut ilmuwan sosial, teori kritis bukan hanya memberikan pengetahuan perihal fenomena sosial atau menjelaskan kondisi sosial semata, melainkan juga mesti memberikan penerangan atau pencerahan kepada para pelaku (Lubis 2015:13). Teori kritis atau disebut

juga tradisi kritis, memiliki tiga keistimewaan pokok (Littlejohn & Foss 2014:89): *Pertama*, mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan atau ideologi yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu. *Kedua*, memperjuangkan suara kaum minoritas atau kaum tertindas dari sebuah sistem yang membelenggunya untuk pembebasan. *Ketiga*, menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan. Teori digunakan untuk mencapai perubahan terutama mengusahakan posisi setara terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan.

Secara implisit, menegaskan bahwa rezim wacana merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan. Wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault, tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritasi dan legitimasi belaka.

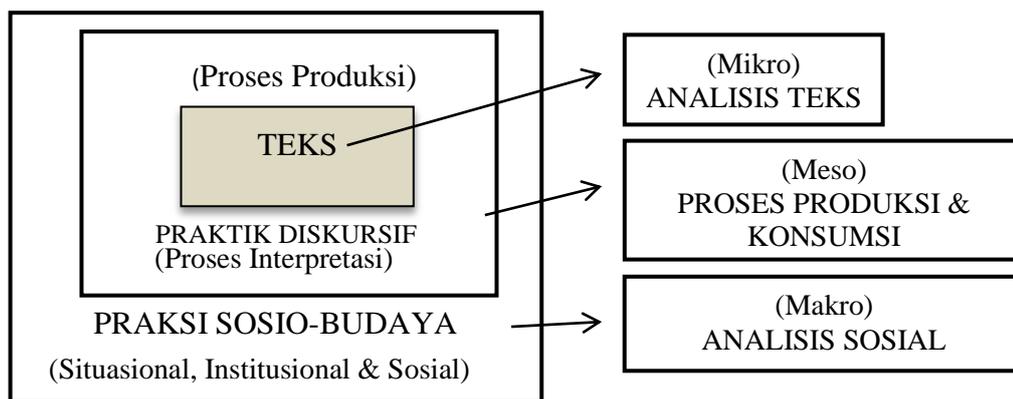
Klaim kebenaran merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang memengaruhi institusi-institusi dan praktik-praktik sosial. Kekuasaan itu tidak beroperasi secara negatif melalui apparatus yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini, kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, bahwa wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka keberadaannya menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan individu lain. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan yang tidak bisa dipisahkan dari apparatus yang dapat mengendalikannya.

Sesuai dengan permasalahan yang ada, dikaitkan dengan diskursus pembangunan Poros Maritim Dunia melalui kebijakan dalam bentuk Perpres. Konstruksi teori yang dibangun berdasarkan CDA Fairclough, di mana tradisi kritis selalu menaruh kecurigaan atas sebuah fenomena. Menitikberatkan pada permainan bahasa, peristiwa diskursif dan fenomena sosial-budaya di mana suatu teks kebijakan publik dibuat. Sebuah kebijakan lahir tidak begitu saja, namun ada kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan tersebut. Akhirnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan melalui permainan bahasa dan proses produksinya.

## METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juni sampai dengan September 2018, termasuk survey dan analisis data. Penelitian dilakukan di instansi pembuat kebijakan yaitu, Setkab RI, Menko Maritim, Indonesia Maritim Ceter (IMC-UI), pengamat dari Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Laut (PKSPL-IPB) dan penerima kebijakan di level masyarakat di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Sorong, Papua. Informan penelitian ini sebanyak 50 Orang yang terdiri dari perumus Perpres lima orang, lembaga kajian dan akademisi tiga orang, serta pelaksana dan masyarakat di Pelabuhan Bitung dan Sorong Papua sebanyak 42 orang. Informan dipilih berdasarkan kapasitasnya dalam merumuskan, meneliti, pelaksana dan penerima Kebijakan Kelautan Indonesia.

Metode penelitian menggunakan *Critical Discour Analysis* (CDA) Fairclough (Haryatmoko 2016:13), tradisi kritis peneliti berada dalam posisi berpihak. Semata-mata untuk membongkar dan mendemistifikasi dominasi yang terdapat dalam wacana. Ada tanggung jawab moral dan politik pada mereka yang melakukan CDA. Model ini menggabungkan analisis wacana yang menggunakan dasar *linguistik* dan pemikiran sosial-politik, yang kemudian diintegrasikan pada perubahan sosial. Berikut Gambar 1 dimensi CDA menurut Fairclough.



Gambar 1 CDA Fairclough (Hariyatmoko 2016:23)

Data yang digunakan sekunder yaitu data berupa hasil kajian, majalah ilmiah, jurnal penelitian, prosiding, buku, dokumen peraturan-peraturan, dan artikel pemberitaan melalui internet dan catatan-catatan harian yang sipatnya tidak resmi. Juga, tahap penelusuran pustaka melalui berita-berita di internet melalui tanggapan-tanggapan yang saling bersiteru.

Analisis data teks buku satu Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia/Perpres 16/2017 sinergi visi Indonesia Poros Maritim Dunia. *Pertama* analisis mikro, dikategorisasi berdasarkan representasi, relasi dan identitas simbol komunikasi kekuasaan. *Kedua* level meso, analisis proses produksi dan konsumsi teks, melalui wawancara dengan informan kunci untuk mengungkap pemrosesan wacana yang meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. *Ketiga* level makro, yaitu situasional, institusional dan sosial kondisi ketika diproduksi dengan wawancara dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Level Mikro

Proses analisis pada level mikro menekankan pada praktek kebahasaan yang ada pada dokumen Perppres 16/2017 KKI, bertujuan untuk melihat penekanan ideologi dan tujuan kekuasaan pengarang. Kekuasaan yang membentuk dan mentranmisikan pengetahuan untuk mengorganisir relasi teks yang berkepentingan, maupun praktik kuasa simbol kekuasaan. Untuk itu berikut Tabel 3 analisis teks sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis tek Perpres 16/2017 untuk mengungkap simbol komunikasi kekuasaan

No	Unit Analisis	Unsur	Uraian
01.	Konsideran, Menimbang: a) bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang <i>sangat luas</i> dengan <i>potensi sumber daya</i> kelautan yang <i>melimpah</i> sehingga <i>perlu dikelola</i> secara <i>optimal</i> dan <i>berkelanjutan</i> .	representasi	Sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
		relasi	Peran kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.
		identitas	Sangat luas, potensi sumber daya, melimpah, dikelola, Optimal dan berkelanjutan.
02.	Konsideran b) bahwa <i>pengelolaan</i> sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka <i>mewujudkan</i> cita-cita Indonesia sebagai <i>Poros Maritim Dunia</i> dan dalam upaya memberikan <i>manfaat sebesar-besarnya</i> bagi <i>kemakmuran</i> rakyat.	representasi	Kekuasaan dalam mengelola sumber daya untuk mewujudkan cita-cita Poros Maritim Dunia.
		relasi	Tujuan dan janji kekuasaan
		identitas	Pengelolaan, mewujudkan, Poros Maritim Dunia, manfaat sebesar-besarnya, dan kemakmuran rakyat.
03.	Pasal 1 Ayat (1). Kebijakan Kelautan Indonesia adalah <i>pedoman umum kebijakan</i> kelautan dan langkah <i>pelaksanaannya</i> melalui <i>program dan kegiatan</i> kementerian/ lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka <i>percepatan</i> implementasi <i>Poros Maritim Dunia</i> .	representasi	Pedoman umum kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Poros Maritim Dunia.
		relasi	Pedoman kekuasaan dalam menjalankan pembangunan.
		identitas	Pedoman umum kebijakan, pelaksanaannya, program dan kegiatan, percepatan, dan Poros Maritim Dunia.
04.	Pasal 1 Ayat (2). <i>Poros Maritim Dunia</i> adalah suatu <i>visi Indonesia</i> untuk menjadi sebuah <i>negara maritim</i> yang <i>berdaulat, maju, mandiri, kuat</i> , serta mampu memberikan <i>kontribusi positif</i> bagi <i>keamanan perdamaian</i> kawasan dan dunia sesuai dengan <i>kepentingan nasional</i> .	representasi	Janji kekuasaan melalui visi kemaritiman.
		relasi	Tujuan, kepentingan dan janji kekuasaan.
		identitas	Poros Maritim Dunia, visi Indonesia, negara maritim, berdaulat, maju, mandiri, kuat, kontribusi positif, keamanan, perdamaian dan kepentingan nasional.
05.	Bab I Pendahuluan alinea ke-13: <i>Visi Poros Maritim Dunia</i> juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai <i>inisiatif</i> yang ada di kawasan seperti <i>ASEAN Community, One Belt One Road (OBOR) Republik akyat Tiongkok (RRT), Act East</i> dari <i>dia</i> dan <i>RE-Balance</i> dari <i>Amerika</i> .	representasi	Memiliki kekuasaan untuk menjalin hubungan antar kekuasaan untuk mencapai tujuan.
		relasi	Kerjasama antar kekuasaan.
		identitas	Visi Poros Maritim Dunia, inisiatif, ASEAN Community, OBOR RRT, Act East dan RE-Balance.

No	Unit Analisis	Unsur	Uraian
06.	Bab V 5.4.2 Infrastruktur Kelautan alinea pertama: <i>Konektivitas harus menjadi tulang punggung pembangunan Indonesiasentris, Jawasentris.</i>	representasi relasi identitas	Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan wilayah geografis Indonesia. Prioritas kekuasaan dalam pembangunan infrastruktur Konektivitas, tulang punggung pembangunan, Indonesiasentris dan Jawasentris.
07.	Bab VI 6.1 Kerangka Pendanaan, Alinea ke-3: <i>Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta/organisasi non Pemerintah.</i>	representasi relasi identitas	Kerjasama antar kekuasaan untuk mendapatkan dukungan pendanaan pembangunan. Kekuasaan ekonomi pembangunan Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan, pemanfaatan, Public Private Partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan swasta.

Konsideran pertama, ‘menimbang’ representasi dari dasar pengambilan keputusan, yang berhubungan dengan relasi komunikasi atas peran kekuasaan dalam mengelola sumber daya laut. Penguatan bahasa seperti: sangat luas, potensi sumber daya kelautan, melimpah, dikelola, optimal dan berkelanjutan, digunakan sebagai identitas komunikasi kekuasaan. Kata ‘dikelola’ tentu memiliki arti sebagai kata kerja yang dilakukan subyek, sehingga memiliki kekuatan untuk dijalankan, sedangkan kata ‘sangat luas’, ‘melimpah’, merupakan kata sifat yang memperjelas kata benda. Dipertegas dengan keterangan kata kerja subyek ‘optimal dan berkelanjutan’ akan menguatkan kata ‘dikelola.’ Konsideran kedua, representasi kekuasaan dalam mengelola sumber daya laut, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Poros Maritim Dunia, dengan relasi komunikasi kekuasaan, untuk membuktikan usaha perwujudan visi dan janji kekuasaan. Dibuktikan dengan identitas komunikasi kekuasaan: pengelolaan, mewujudkan, Poros Maritim Dunia, manfaat sebesar-besarnya, dan kemakmuran rakyat, yang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Penjelasan di Bab I (satu) pada Pendahuluan di alinea ke-13: yaitu “Visi Poros Maritim Dunia juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti ASEAN Community, One Belt One Road (OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Act East dari dia dan RE-Balance dari Amerika.” Hal ini menunjukkan bahwa, visi Poros Maritim Dunia memiliki hubungan dengan berbagai inisiatif antarnegara, karena jika diamatai perkembangan global dipengaruhi oleh ambisi Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar untuk meningkatkan pengaruh dengan kerjasama antarnegara. Inisiatif tersebut tentu akan membawa dampak bagi kedua belah pihak, OBOR Tiongkok dengan Poros Maritim Indonesia sama-sama ingin mengembangkan jalur infrastruktur kemaritiman bagi perdagangan. Sementara di Bab V (lima) poin 5.4.2 “Infrastruktur Kelautan alinea pertama: Konektivitas harus menjadi tulang punggung pembangunan yang

Indonesiasentris, bukan Jawasentris.” Pembangunan infrastruktur kemaritiman untuk pemerataan ekonomi bukan pembangunan di Pulau Jawa, sehingga konflik sosial akibat ketimpangan dan disparitas antar wilayah bisa diatasi. Bab VI (enam) poin 6.1 Kerangka Pendanaan, Alinea ke-3: Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan *skema Public Private Partnership* (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta/organisasi *non* Pemerintah. Untuk menuntupi kebutuhan biaya pembangunan yang besar, pemerintah menarik investor dengan skema pinjaman lunak dengan kerjasama antarnegara atau swasta asing. Model ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan politik terbuka, dimana peran swasta lebih berperan dalam pengelolaan usaha badan publik, sementara pemerintah hanya menjadi pengawas.

### Level Meso (Peristiwa Diskursif)

Teks sangat dipengaruhi oleh nilai pada proses produksi, pola kerja, bagan kerja dan rutinitas dalam menghasilkan teks, serta proses konsumsi teks (tujuan dan sasaran), sangat berpengaruh terhadap tujuan serta arah kebijakan. Adapun, proses produksi Perpres 16/2017 KKI diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan draf Perpres melalui SK/03/DI/Maritim/II2016 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Kerjasama Maritim Kemenko Kemaritiman. Terbentuk sebanyak 16 orang tim Pokja, yang terdiri dari perwakilan tim antar departemen/kementerian/lembaga yaitu: 11 orang perwakilan staf Deputy, Kabiro dan Assdep dari Kemenko Maritim, satu orang Kasubdit dan satu orang Assdep dari Setkab, satu orang dari Kementerian Bappenas, satu orang dari biro hukum KKP dan satu orang Kabid dari Sesneg.

*//Kemenko Maritim selaku Kementerian Koordinator tidak punya kewenangan untuk mengusulkan suatu produk hukum// Yang bisa melakukan itu adalah pemrakarsa yaitu KKP// (IPP0104).*

Jika dilihat dari Perpres 65 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi KKP di Pasal 2 bahwa, “Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam membantu tugas Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Oleh karena itu, KKP yang seharusnya memiliki hak menyusun dan merumuskan KKI. Sementara, Perpres 10 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Kemenko Maritim di Pasal 2 ditegaskan bahwa, “Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.

*//Pada saat penyusunannya kita/ baru mereka yang akan mengharmonisasi //Jadi prosedur pemrakarsa KKP// (IPP0101).*

Peran KKP dalam hal ini menjadi pemrakarsa, *lead* penyusunan draf KKI oleh Kemenko Maritim. Eksistensi peran Menko Maritim lebih kuat kedekatan dan pengaruhnya dengan Presiden dibandingkan dengan KKP, sehingga proses penyusunan draf KKI dikuasai Kemenko Maritim. Perumusan naskah dirumuskan berdasarkan ide dan arahan dari Menko Maritime dan disetujui oleh Presiden.

Proses konsumsi dilakukan kepada perwakilan Negara-negara sahabat dan forum-forum internasional. Sasarannya untuk menjaring investasi dan kerja sama antarnegara dalam pembangunan proyek kemaritiman. Proyek kemaritiman

untuk mendukung konsep konektivitas laut untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dari luar dan dalam negeri. Melalui kerjasama antar negara, menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mendukung pembangunan maritim. Kerjasama investasi pemerintah Cina dan Indonesia contohnya, memiliki kesamaan visi terkait proyek infrastruktur maritim. Selain itu juga, dengan melakukan presentasi dan pendistribusian buku dalam Bahasa Inggris, media pidato, jejaring media sosial dan Website KSP dan kementerian/lembaga yang menangani bidang kemaritiman.

### **Level Makro (Aspek Sosial-budaya)**

Aspek situasional dipengaruhi oleh wilayah perairan Indonesia yang luas dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, sehingga menjadi rawan terjadinya konflik batas maritim. Seperti yang terjadi konflik antarnegara di wilayah Laut Cina Selatan, karena Laut Cina Selatan adalah jalur utama perdagangan dunia dari dan menuju Asia-Pasifik. Juga lanjutan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, erat kaitannya dengan posisi Natuna dan Kepulauan Sparty yang banyak mengandung migas dan mineral (Maksum 2015:12). Indonesia berada di daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia yang secara langsung menghubungkan ekonomi negara-negara maju. Selain itu, beberapa selat strategis Indonesia menjadi lalu lintas maritime dunia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar (Chen in *et al* 2014: 68). Sementara, kebijakan ALKI menjadikan Indonesia sebagai negara menganut sistem terbuka, sehingga berbagai pelayaran dan penerbangan asing bebas melintasi wilayah Indonesia. Untuk itu, berbagai ancaman keamanan pada jalur ALKI menjadi ancaman bagi Poros Maritim (Rustam 2016:1). Laut berfungsi untuk mewujudkan integrasi bangsa dan sebagai ruang juang bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negara (Sautma *et al* 2014:1).

Secara Institusional dalam rangka penguatan kelembagaan ditetapkan Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Perpres No. 10 Tahun 2015. Implementasi praktis dari kebijakan dan program melalui proses transformasi struktural, Menko Maritim LBP (Indonesia Maritim 2016:1), persoalan regulasi yang saling tumpang tindih antar satu sektor dengan lainnya menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selain itu, juga akibat terjadinya penyalahgunaan wewenang, kurangnya informasi kebijakan ekspor dan impor serta maraknya penyelundupan. Diperlukan adanya perubahan birokrasi perizinan perdagangan dan kepabeanaan. Menurut Kepala BPEN Deperdag (Soegiri 2008: 90), lambatnya penanganan perizinan disebabkan oleh banyaknya instansi pemerintah dan swasta yang terlibat, sehingga perlu adanya penyederhanaan sistem birokrasi untuk peningkatan transparansi dan komunikasi antar instansi pemerintah. Sementara, konflik pengelolaan wilayah laut, mencakup wilayah pengelolaan, substansi wewenang pengelolaan, dan pola pengaturan pengelolaan wilayah tata ruang laut (Lekipiouw & Sherlock 2014: 28-29).

Secara sosial berkaitan dengan nilai dan norma budaya masyarakat yang mempengaruhi kebijakan. Nilai dan norma dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan penegakan hukum. Aspek sosial menurut Durkheim (Suhardi 2009: 107), juga bersifat represif, yakni memaksa individu. Individu dalam konteks ini dipaksa, dibimbing, diyakinkan dan didorong untuk berperilaku

sesuai dengan ketentuan-ketentuan nilai dan norma yang sudah ada dalam masyarakat. Menurut hasil penelitian Lumintang (2015:7), faktor-faktor sikap masyarakat yang rendah akibat sikap mental yang suka menerobos, sikap mental yang tidak percaya kepada diri sendiri, sikap mental yang tidak berdisiplin yang murni dan sikap mental yang mengabaikan tanggung jawab. Sementara kondisi ekonomi, menurut hasil survei SMRC menunjukkan, Indonesia di bawah Jokowi-JK memburuk. Sejak dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014 hingga menjelang setahun, kondisi ekonomi nasional cenderung berubah dari positif menjadi negatif (Prabowo 2015:1).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Level Mikro, Korpus teks dikuasakan untuk merepresentasikan peran dan potensi kekuasaan usaha peningkatan pembangunan. Sejarah dan hak yurisdiksi laut menjadi modal kekuasaan untuk mendapat dukungan politik pada pokok isi kebijakan. Peningkatan kekuasaan dengan hubungan luar negeri bertujuan untuk peningkatan investasi untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia melalui investasi projek infrastruktur. Melalui ideologi 'Neoliberal' dan politik terbuka pembangunan diarahkan kepada Publik Private Partnership, sehingga dominasi ranah publik dikuasai oleh swasta asing. Identitas komunikasi dimainkan melalui simbol komunikasi kekuasaan melalui dokrinasi, ajakan, seruan, dan dominasi entitas seperti; sangat luas, melimpah, dan posisi strategis, serta penggunaan janji dan harapan melalui; kesejahteraan rakyat, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan kemakmuran rakyat, juga terdapat upaya untuk penanaman ideologi melalui pengulangan kata Poros Maritim Dunia.

Level Meso, peristiwa diskursif dapat diketahui dengan proses produksi Prepres secara personal menunjukkan dominasi kekuasaan Kemenko Maritim atas perumusan Perpres. Dominasi anggota yang bekerja merumuskan Perpres menunjukkan pelemahan kekuatan ide dan kekuasaan pada sistem produksi kebijakan. Proses konsumsi dilakukan sebagai eksistensi Kemenko Maritim kepada Presiden ditunjukkan dengan penyebaran teks kepada Negara sahabat dan forum-forum internasional sebagai pencarian dukungan investasi projek kekuasaan untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia.

Level Makro, situasi batas perairan Indonesia menjadi konflik di Laut Cina Selatan. Selat strategis Indonesia menjadi perlintasan perdagangan dunia. Namun, sistem terbuka pada ALKI menjadi ancaman terhadap konflik perbatasan maritim. Secara institusional, peran penguatan kelembagaan atas pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Bakalma tidak membuat proses birokrasi menjadi mudah. Pengelolaan laut, dikuasakan oleh Kemenko Maritim selaku Kementerian Koordinator yang menangani kemaritiman, namun KKP selaku Kementerian yang lama menangani kelautan, tidak sinkron dengan keberadaan Kemenko Maritim. Aspek sosial berkaitan dengan dampak kondisi perekonomian satu tahun menjabat Jokowi-JK menjadi Presiden menurun, sehingga kinerja Pemerintah dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan yang ada. Projek infrastruktur pemerintah sebagai sektor vital dalam proses pencapaian pertumbuhan ekonomi masyarakat diyakini akan menghilangkan disparitas antar wilayah Barat dan Timur Indonesia, yang berdampak pada disintegritas bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara R. 2016. Strategi kebahasaan Presiden Jokowi dalam menanamkan ideologi dan manifesto pemerintahan. *Jurnal Litera*.12(2):379-388.
- Bungin B. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta [ID]: Kencana Prenada Media Group.
- Chen in. *et al.* 2014. *New Perspectives on Indonesia: Understanding Australia's Closest Asian Neighbour*. Perth: Perth US Asia Centre.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta [ID]: LKiS.
- Foucault M. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta [ID]: IRCiSoD.
- Gabriel L. 1999. Posmodernisme dalam pengembangan wacana formulasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisipol*. 3(2):206-219.
- Halwati U. 2013. Analisis Folcoul dalam membedah wacana teks dakwah di media massa. *At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. 1(1):145-158.
- Haryatmoko. 2016. *Analisis Wacana Kritis: Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta [ID]: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia Maritim. 2016. Regulasi tumpang tindih hambatan utama Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. [internet]. (diunggah 2018 Desember 25). <https://maritim-indonesia.co.id/2016/09/regulasi-tumpang-tindih-hambatan-utama-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/>.
- Lekipiouw and Sherlock H. 2014. Pengaturan wewenang dalam pengelolaan wilayah laut. *Jurnal Sasi*. 20(2): 28-35.
- Littlejohn Stephen W dan Foss Karen A. 2014. *Teori Komunikasi Theories of Human Communication. Edisi 9*. Jakarta [ID]: Salemba Humanika.
- Lubis A. Y. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Jakarta [ID]: Raja Grafindo Persada.
- Lumintang J. 2015. Pengaruh perubahan sosial terhadap kemajuan pembangunan masyarakat di Desa Tara-Tara 1. *e-journal Acta Diurna*. 4(2): 1-9.
- Maksum A. 2015. Poros maritim dan politik luar negeri Jokowi. *Andalas Journal of International Studies*. 4(1):1-26.
- Rustam I. 2016. Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*.1(1):1-21.
- Saleh T. M. 2015. Konstruksi pesan penegakan hukum di Indonesia dalam film: Java Heat. *Jurnal E-Komunikasi*. 3(1):1-12.
- Sautma H. Ronny, Hantoro M. Novianto, Dwi K. Shanti, *et al.* 2014. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Laut. *P2DI Sekjen DPR-RI*. 1-9.
- Sobur A. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Freming*. Bandung [ID]: Remaja Rosdakarya.
- Soegiri H. 2008. Peran Ekspor-Impor terhadap perekonomian Jawa Timur dengan pembenahan fungsi pelabuhan di jawa Timur. *DIE Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. 5 (1): 87-120.
- Suhardi. 2009. *Pengembangan Inovasi Pertanian*. Cianjur [ID]: Balai Penelitian Tanaman Hias.